

**MOTIF PRIORITAS KEBIJAKAN PERTAHANAN ERA JOKOWI DALAM  
MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NKRI  
TAHUN 2014 -2020**

**YUNI PERMATASARI**

Hubungan Internasional Program Magister  
Pascasarjana Universitas Mugammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55183 Indonesia  
E-mail : [yunipsari3697@gmail.com](mailto:yunipsari3697@gmail.com)

**Abstract**

*The change in the direction of defense policy that took place during the Jokowi Government era has changed a little. As a decision, the priority motives of Jokowi's defense policy in the second period became the highlight. As the fourth civilian president, with a previous leader who could not be in full power made the biggest challenge in how to keep the NKRI defense from external threats. Therefore, the question arises as to what makes the decision-making background. This paper uses the theory of State Sovereignty (Jean Bodin), Security (Paul D. William) and Balance Of Power, whether there are internal indicators of military actors also in the decision. In addition, this article explains the priority motives of defense policy in the Jokowi era as an effort to protect the sovereignty of the homeland from the Chinese threat (South China Sea) in Indonesian waters, and other factors are discussed in this paper. The author concludes that the perspective of realism / military power is still a traditional force, with civilian supremacy over military power as an effort in dealing with external threats to Indonesian territorial security from external threats in the era of Jokowi's leadership.*

*Keywords: Jokowi's Defense Policy Priorities, South China Sea Issues, Indonesian Military-Politics.*

**Abstrak**

Perubahan arah kebijakan pertahanan yang terjadi pada era Pemerintahan Jokowi sedikit banyak memiliki perubahan. Sebagai sebuah keputusan, motif prioritas kebijakan pertahanan Jokowi di periode ke II menjadi sorotan. Sebagai presiden sipil keempat, dengan pemimpin sebelumnya yang tidak dapat berkuasa penuh menjadikan tantangan terbesar dalam bagaimana menjaga pertahanan NKRI dari ancaman luar. Oleh karena itu, munculah pertanyaan apa yang menjadikan latar belakang pengambilan keputusan tersebut. Tulisan ini menggunakan teori Kedaulatan Negara (Jean Bodin), *Security* (Paul D. William) dan *Balance Of Power*, apakah ada indikator internal dari aktor militer juga dalam keputusan tersebut. Selain itu, tulisan ini menjelaskan motif prioritas kebijakan pertahanan di era Jokowi sebagai upaya penjagaan kedaulatan NKRI dari ancaman Cina (Laut Cina Selatan) di perairan Indonesia, dan faktor-faktor lainnya dibahas pada makalah ini.. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perspektif realisme/kekuatan militer masih menjadi kekuatan tradisional, dengan supremasi sipil terhadap kekuatan militer sebagai upaya dalam penanganan ancaman luar pada keamanan territorial Indonesia dari ancaman luar di era Kepemimpinan Jokowi.

**Kata Kunci:** Prioritas Kebijakan Pertahanan Jokowi, Isu Laut Cina Selatan, Politik-Militer Indonesia

## 1. Pendahuluan

Pada era globalisasi sekarang ini banyak isu-isu global seputar politik dan keamanan masih merupakan ancaman nyata bagi suatu negara. Permasalahan mengenai isu-isu teritori (Laut Cina Selatan, Perairan Natuna), kecanggihan alat-alat pertahanan negara-negara sekitar yang terus berkembang masih menjadi faktor yang berpengaruh besar bagi suatu negara melakukan peningkatan pertahanan (*self deffance*). Indonesia termasuk salah satu negara yang mulai fokus memperkuat pertahanannya, terutama pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Di sini penulis akan membahas tentang alasan kebijakan pertahanan dijadikan prioritas utama di era kepemimpinan Jokowi. Prioritas kebijakan tersebut diambil karena memiliki dampak bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang strategis, luas, dan banyaknya wilayah teritori yang berbatasan langsung dengan negara-negara sekitar.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah cukup luas, kekayaan alam yang melimpah dan letak strategis sehingga menjadikannya sangat penting bagi negara-negara industri maju. Dengan menjadikan negara-negara tersebut maju maka ancaman dari luar yang mungkin akan berdampak terhadap negara Indonesia pun menjadi semakin besar. Isu-isu dari luar pun sering terjadi dengan negara Indonesia, seperti halnya pada konflik Laut Cina Selatan dan terdapat banyak kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia di Natuna dengan waktu yang cukup lama yang mengharuskan Presiden RI Jokowi dengan didampingi para pemimpin Tentara Nasional Indonesia melakukan patroli atau terjun langsung ke lapangan mengarungi perairan Laut Natuna menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) pada tanggal 8 Januari 2020. Sehingga dalam mengatasi keamanan maritim pun diperlukan pula perubahan yang sesuai mengikuti perubahan arah lingkungan strategis negara sekitar (Sulaiman, 2019). Sebelum kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh Jokowi, kebijakan pertahanan dari masa sebelum Orde Baru dan setelah Orde Baru mengalami beberapa perubahan, namun tidak berubah total sepenuhnya (Mietzner, 2006). Hal tersebut pula terlihat pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pembaharuan alutsista SBY merujuk pada standar minimum yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya atau yang lebih

sering kita dengar dengan *Revolution in Military Affairs* (RMA) (Posen, 1984).

Selain itu pula letak Asia Tenggara yang strategis telah menjadikan negara-negara sekitar saling berlomba dalam pembaharuan baik segi militer dan alat-alat perang sehingga hal tersebut menjadikannya bentuk dari implementasi *balance of power* itu sendiri. Sehingga kemajuan alat tempur baik dari tempur udara yang mampu melintasi seluruh wilayah Indonesia, menjadikannya sebuah ancaman oleh Indonesia. Sehingga Indonesia pada masa Menteri Pertahanan Prabowo pula berencana memperbaharui pesawat tempur dengan pembelian 100 pesawat tempur milik AS baik seri F-15, F-18 dan F-35. Hal tersebut pula sama pada armada laut negara tetangga yang memiliki kemampuan samudera (*blue water navy*) yang bukan hanya mampu beroperasi di perairan teritorialnya (*green water navy*) tetapi juga mampu menjadikannya salah satu faktor negara Indonesia untuk memperkuat kebijakan pertahanan dari masa sebelum pemerintahan Jokowi sampai pada kebijakan era Jokowi sekarang ini (Wolfe, 1990, pp. 86-89). Kebijakan MEF merupakan faktor utama dalam pembangunan sistem dan kekuatan di Indonesia sehingga dalam kurun 20 tahun, sejak 2010-2024 kekuatan pokok minimum diperkirakan akan berhasil melampaui dari target yang ingin dicapai guna perlindungan kedaulatan dan keamanan dalam negeri dari ancaman luar yang nyata (Laut Cina Selatan dan Perairan Natuna) serta disegani di kawasan regional maupun internasional (Buzan, 1991, pp. 18-19).

Mengamati dari kebijakan pertahanan sebelumnya, Prioritas Kebijakan Pertahanan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kepemimpinan SBY hal tersebut dapat kita lihat pada pemberian prioritas guna pemenuhan alutsista dan terwujudnya MEF, selain itu pidato politik Jokowi tentang isu di Natuna dan kunjungan langsung ke Natuna merupakan bentuk keseriusan dalam menghadapi isu dengan Cina. Isu pertahanan di Indonesia kini bukan hanya menjadi salah satu isu tren yang sering terjadi. Cina salah satu negara dengan perekonomian terkuat dianggap menjadi salah satu negara penyokong kemampuan ekonomi dan infrastruktur pada Indonesia. Mirisnya hal tersebut semakin membuat Indonesia bergantung terhadap Cina dalam beberapa tahun terakhir, ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh Cina di Indonesia sebagai bagian dari program *Belt and*

*Road Initiatives* (BRI). Upaya membatasi ketergantungan terhadap Cina penting juga untuk menjaga posisi tawar Indonesia dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik Cina (Connelly, 2019).

Politik luar negeri Indonesia tetap di jalur bebas aktif dengan kemandirian untuk mengambil sikap (Sukamto, 2020). Sikap yang cukup tegas dilakukan Indonesia dalam menyikapi kapal asing Cina di perairan Natuna menyebabkan kelunakan oleh Cina, yang memberikan pernyataan bahwa diharapkan hubungan bilateral dan kerjasama baik di bidang ekonomi dapat terus berjalan. Hal ini karena Indonesia memegang posisi kunci yang sangat strategis dalam implementasi BRI dan Cina membutuhkan Indonesia untuk proyek ambisius milik Cina tersebut yang harus melewati wilayah maritim Indonesia dan Cina dianggap tidak dapat merampungkan proyek tersebut tanpa melibatkan Indonesia (CNN, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin melihat mengapa pada Era Jokowi menjadikan kebijakan pertahanan sebagai prioritas dan perbedaan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya (SBY) dalam penerapan kebijakan pertahanan. Prioritas yang dilakukan Jokowi dalam porsi Kebijakan Pertahanan merupakan salah satu bentuk pertahanan kedaulatan karena adanya masalah atau GAP dan faktor-faktor dibaliknya menarik untuk dikaji, karena sejauh ini pembahasan mengenai prioritas pertahanan dan kedaulatan di Indonesia pada kepemimpinan Jokowi masih minimnya menelaah tentang perubahan prioritas dalam pembuatan kebijakannya.

## 2. Rumusan Masalah

“Mengapa Kebijakan Pertahanan Menjadi Prioritas Utama Jokowi dalam Mempertahankan NKRI tahun 2014-2020?”

## 3. Kerangka Teori

a) *Sovereignty* atau kedaulatan suatu negara merupakan teori yang menjelaskan kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur seluruh wilayah teritori dan masyarakatnya dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tersebut. Phillip Allot berpendapat *Sovereignty is not a fact but a theory*. Dimana teori ini bersifat

dinamis melihat arah perkembangan dunia internasional dari waktu ke waktu. Sehingga kemunculan (*the pride of nations*) atau harga diri bangsa tergantung pada negara tersebut. Seperti pada contoh yang terjadi di Asia Tenggara dimana negara sekitar seperti Singapura dan Malaysia yang waktu itu terus melakukan pembaharuan alutsista, membuat Indonesia melakukan tindakan pembaharuan alutsista pula seperti pembuatan Kapal Selam dengan bekerja sama antara PT PAL dan Korea Selatan (Allof, 2001).

- b) *Security* atau keamanan (Paul D. William) para sarjana Hubungan Internasional berargumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah “*contested concept*”. Pendekatan tradisional yang didominasi oleh mashab Realisme menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari seangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal (Haftendorf, 1991).
- c) *Balanced of Power* atau keseimbangan kekuasaan merupakan suatu kajian teori dalam Hubungan Internasional yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekuasaan agar mencegah salah satu negara menjadi paling kuat (*dominan*) bagi negara lain (Kasanopha, 2020).

Dalam proses kedaulatan keluar, negara mampu mengadakan bentuk hubungan luar negeri dan pertahanan diri jika Meski menyebabkan kekhawatiran, pemerintah menyatakan kedekatan dengan China tidak harus dipandang miring atau bahkan disalahartikan. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan bahwa Indonesia bersikap netral dalam bidang investasi ekonomi Cina dan menanggapi hal tersebut diperlukan. Indonesia berupaya bermain aman dalam menggambarkan ambivalensi yang mendalam terhadap China dan menghindari terlihat terlalu dekat dengan China. Indonesia tetap memiliki landasan hukum dan prinsip terkait dengan politik luar negeri dan mekanisme proses pemerintahan yang tidak tunduk atau diintervensi pihak asing. Indonesia berhubungan secara terhormat dengan negara manapun, tidak pernah inferior terdapat ancaman dari luar baik berupa bentuk penyetaraan kekuatan atau *balance of power* dengan pemberian prioritas. Adapun berikut alasan penyetaraan kekuatan

pertahanan dijadikan prioritas dalam menjaga kedaulatan dikarenakan Penjagaan kedaulatan NKRI dari faktor lingkungan internasional sebagai upaya pencegahan dan persiapan ancaman dari luar. Ketertinggalan alat dan fasilitas pertahanan di lingkungan internasional menjadikan alasan prioritas kemandirian dengan modernisasi alat dan teknologi alutsista sebagai bagian bentuk dari *pride* atau gengsi dikawasan Asia Tenggara maupun Pasifik. Latihan militer sepihak ataupun bersama (bilateral) dilakukan di wilayah perairan Laut China Selatan di tengah ketegangan yang muncul, sehingga semakin memanas ketegangan dan memicu eskalasi konflik di kawasan. (Laksamana Samuel J. Locklear III, 2013).

Secara khusus, Indonesia, sekalipun bukan negara pengklaim memiliki kepentingan, namun klaim mutlak yang dilancarkan China atas seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, pada tahun 2012 tersebut, turut mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Dengan klaim mutlak tersebut, bukan saja kedaulatan wilayah Indonesia atas Kepulauan Natuna yang terancam, tetapi juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, yang di hormeksistensinya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, khususnya hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Padahal, tanpa ini saja, hak-hak tradisional nelayan Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna sudah terancam (Suara Pembaharuan, 2013).

Kawasan Laut Cina yang strategis baik sebagai jalur perdagangan internasional, pelayaran dan komoditas kepentingan masyarakat dunia menjadikannya wilayah perairan yang rawan terjadi konflik. Ditambah dengan Indonesia yang mengubah nama Laut China Selatan yang berada di sebelah utara Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dengan sebutan Laut Natuna Utara pada 2016 lalu memicu isu baru bagi Cina yang menentangnya (Dahuri, 2000).

Nama perairan yang diubah itu hanyalah yang masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Terlebih seringnya masuk kapal asing China yang mengambil sumber daya alam

Indonesia menjadikan konflik semakin memanas, dimana pihak Indonesia pun akhirnya menembaki Hal tersebut dapat dibentuk dengan Hard Balancing dan Soft Balancing. Dimana hal tersebut merupakan bentuk strategi suatu negara mengoptimalkan kekuatan militer, pertahanan dan kemandiriannya guna menyaingi negara yang ia anggap menjadi ancaman. Selain itu Soft Balancing merupakan tindakan pengoptimalan kekuatan secara diam-diam dengan mengajak negara-negara lainnya membentuk aliansi, hal tersebut baik dari wilayah regional sekitar bahkan secara global. Soft Balancing sewaktu-waktu dapat berubah menjadi Hard Balancing apabila negara sekitar yang dianggap mengancam mulaimelakukan pengoptimalan kekuatan secara terang-terangan dan mulai mengancam (T.V. Paul, 2004).

#### 4. Pembahasan

##### 1. *Balanced Of Power* Dan Pertahanan Kedaulatan Oleh Jokowi di Periode II

Sejarah pergantian penguasaan dari dari penguasa tradisional negara sekitar itupula menjadikan upaya konfrontatif saling klaim tumpang tindih beberapa negara seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Indonesia, yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut China Selatan muncul pada tahun 2012 (Rosarian & Pahlevi, 2013).

Potensi kekayaan Laut Cina Selatan di Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar SDA, terutama mineral, gas bumi dan minyak bumi. Hal tersebut menyebabkan pemerintahan Cina optimistik dalam pengambilan wilayah, hal tersebut di dukung dengan riset-riset yang dilakukan. Laporan lembaga Informasi Energi Amerika (Energy Information Administration--EIA), RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Total perdagangan yang melewati Laut Cina Selatan pada tahun 2016 sebesar \$ 3,37 triliun Persentase perdagangan gas alam cair global yang transit melalui Laut Cina Selatan pada tahun 2017 sebesar 40% dan 3.200 hektar tanah baru yang dibuat China di Kepulauan Spratly sejak 2013 (CFR, 2020).

Perairan Laut Cina Selatan merupakan rute

perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi negara sekitar. Sengketa kepemilikan dan kedaulatan teritorial merujuk pada dua gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly Klaim atas wilayah perairan Lautan Cina Selatan sejak 2012 telah menyebabkan kekuatiran, ketegangan dan bahkan manuver-manuver militer dan upaya saling unjuk kekuatan bersenjata dan upaya provokasi bahkan intimidasi di perairan dan arena diplomasi antar negara baik pengklaim dan non bahkan negara sekitar lainnya atas masa depan kontrol, stabilitas dan keamanan wilayah perairan Laut Cina Selatan. Aksi saling cegah dan usir tersebut sudah mengarah pada konflik berskala rendah (*low intensity conflict*) dan kemungkinan pada intensitas yang lebih tinggi mengingat besarnya kepentingan negara tersebut (BBC Indonesia, 20113) kapal asing yang tidak jera akan peringatan yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia. Menelik Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, di wilayah tersebut Indonesia memiliki hak berdaulat dalam mengatur dan memberdayakan sumber daya di perairan Laut Natuna Utara karena masuk ke dalam ZEE Indonesia secara sah (Dahuri, 2000).

Indonesia menjadi negara bagian dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of The Sea* atau *Unclos*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, tanggal 10 Desember 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS sejak tahun 1982 dengan UU No 17 Tahun 1985 dan resmi berlaku pada 16 November 1994. Dimana Indonesia menjadi negara resmi yang mendapatkan pengakuan internasional dari konsepsi Wawasan Nusantara yang sudah diperjuangkan oleh Indonesia melalui Deklarasi Djuanda sejak tanggal 13 Desember 1957. Yang berarti Indonesia sebagai negara kepulauan sudah diakui sejak dulu. Mengingat ancaman dari luar yang masuk seperti *illegal fishing* yang dilakukan Cina masuk ke perairan Natuna Utara. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsoedi meminta Cina untuk mengetahui batas-batas wilayah perairan suatu negara mengacu ZEE yang dibuktikan dari Deklarasi Djuanda dan masuknya Indonesia dalam negara anggota UNCLOS, bahwa wilayah perairan Natuna masuk ke dalam kedaulatan Negara Indonesia (Likadja, 1988).

Melihat permasalahan mengenai perbatasan Laut dengan Negara sekitar khususnya dengan Laut Cina Selatan yang telah lama mengalami isu-isu intervensi. Pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 yang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dengan visi menjadi Poros

Maritim Dunia. Momentum bangkitnya kekuatan Asia ditangkap oleh Indonesia untuk mewujudkan kembali menjelaskan tentang usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuatan dan pertahanan nasional dari modernisasi atau peningkatan kekuatan negara luar yang dianggap sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman. Keseimbangan kekuatan (*balance of power*), secara realistis selalu diciptakan, sehingga tidak adanya satu negara yang lebih dominan dibandingkan negara lainnya terutama di suatu kawasan teritorial tertentu. Sehingga, kondisi anarki itu sendiri tidaklah memberi kemenangan dan manfaat dini pada kekuatan militer negara, tetapi sebagai kontrol baik antar negara yang saling melakukan perlombaan senjata atau penyeimbangan kekuatan bagi semua negara yang berkontes dan berkepentingan terhadap klaimnya di sebuah kawasan itu sendiri (Sheehan, 1996).

Secara realistis, bagi negara yang memiliki jumlah penduduk besar seperti RRC dan AS juga memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan kekuatan angkatan perangnya (militer). Selain kapasitas penduduk yang tinggi disokong pula pada kemajuan teknologi membuat daya tawar yang besar pula dalam menciptakan keseimbangan kekuatannya terutama di teritori kawasan. Faktor ini dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan (*survival*) sebuah bangsa atau negara dalam melakukan kontestasi kekuatan di lapangan atau suatu kawasan (Sheehan, 1996).

Adapun usaha yang dilakukan dengan membentuk aliansi atau kerja sama dengan negara lainnya dalam penguatan keamanan dan pertahanan negara. Hal tersebut pula menjadi salah satu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia yang melakukan kerjasama ke negara sekitar regional maupun global. Selain itu kerjasama dengan negara produsen alutsista terbaik dunia seperti AS, Australia, Rusia dan lainnya dalam penyokong modernisasi alutsista dan pertukaran ilmu teknologi terbaru pada bidang pertahanan menjadi ancaman. Keseimbangan kekuatan (*balance of power*), secara realistis selalu diciptakan, sehingga tidak adanya satu negara yang lebih dominan dibandingkan negara lainnya terutama di suatu kawasan teritorial tertentu. Sehingga, kondisi anarki itu sendiri tidaklah memberi kemenangan dan manfaat dini pada kekuatan militer negara, tetapi sebagai kontrol baik antar negara yang saling melakukan perlombaan senjata atau penyeimbangan kekuatan bagi semua negara yang berkontes dan berkepentingan terhadap klaimnya di sebuah kawasan itu sendiri (Sheehan, 1996). Secara realistis, bagi negara yang memiliki jumlah penduduk besar seperti RRC dan AS juga

memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan kekuatan angkatan perangnya(militer). Selain kapasitas penduduk yang tinggi disokong pula pada kemajuan teknologi membuat daya tawar yang besar pula dalam menciptakan keseimbangan kekuatannya terutama di teritori kawasan. Faktor ini dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan (survival) sebuah bangsa atau negara dalam melakukan kontestasi kekuatan di lapangan atau suatu kawasan (Sheehan, 1996).

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan dan motif prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi tahun 2014-2020 guna mempertahankan kedaulatan NKRI dikarena 2 faktor, baik eksternal dan internal. Faktor dari luar berupa ancaman Kedaulatan NKRI; Kebangkitan China, Laut China Selatan, Kapal China di Perairan Natuna, persaingan modernisasi alutsista negara sebagai dinamika pertahanan dan keamanan Indonesia. Dijelaskan pula adanya perubahan kebijakan pertahanan Jokowi dari periode pertama dan kedua dan perbedaan dengan Pemimpin sebelumnya. Ancaman dari luar dan modernisasi alutsista negara sekitar sebagai bermulanya balanced of power dan pertahanan kedaulatan oleh Jokowi. Prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi dari 2020, berupa Kerjasama dengan militer USA, Korsel dan Australia dalam kebijakan pertahanan menjaga kedaulatan Indonesia, kerjasama modernisasi alat alutsista Indonesia dari negara-negara luar(USA, Korsel) dan industri dalam negeri (PT PAL, PT Dirgantara) merupakan suatu upaya pemenuhan MEF(Minimum Essential Force) guna pertahanan kedaulatan yang dilakukan oleh Jokowi. Faktor internal atau indikasi internal pula mempengaruhi dalam perubahan arah kebijakan pertahanandijadikan prioritas. Prabowo selaku rival Jokowi pada Pemilu 2019 pernah mengungkit masih kurangnya anggaran dan kurang fokusnya pada modernisasi alutsista dan sistem pertahanan negara yang dianggap sudah tua. Selaku eks militer Jokowi mempercayakan pada Menhan periode II ini dengan masih dibawah kontrol perintah Presiden dan pengawasan DPR sehingga kenaikan atau pernah mengantongi anggaran terbesar di tubuh Kementerian Pertahanan sangatlah relevan.

## Daftar Pustaka

- Agiesta, F. S. (2020, Januari 7). Sejarah Sengketa Natuna dan Ambisi China Menguasainya . Retrieved from <https://www.merdeka.com>: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-sengketa-natuna-dan-ambisi-china-menguasainya.html?page=5>
- Arsana, I. M. (2007). *Batas Maritim Antar-Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- BBC Indonesia. (2013). *Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan,*”.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear*, Second Edition. London: Harvester Wheatsheaf.
- CFR. (2020, Desember 4). <https://www.cfr.org>. Retrieved from Global Conflict Tracker; Conflict Territorial Disputes South China Sea: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>
- CNN. (2019, Oktober 18). *Relasi Indonesia China di Era Jokowi: Mau tapi Malu*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>:*Jokowi Kunjungi Natuna, Bertemu Nelayan dan Tinjau Kapal Perang*. Natuna. Connelly, A. (2019). *Hubungan Cina Merupakan Dilema Bagi Jokowi diawal Kepemimpinannya*. Dahuri, R. (2000). *Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, A., & Iswinarno, C. (2020, Maret 25). <https://www.suara.com/bisnis>. Retrieved from Ini Daftar 10 Kementerian yang Dapat Jatah Anggaran Besar Pada APBN 2020: <https://www.suara.com/bisnis/2019/08/16/195305/ini-daftar-10-kementerian-yang-dapat-jatah-anggaran-besar-pada-apbn-2020>
- Fortuna, D. (2019). *Indonesia-China Relations: To be Handled with Care*. ISEAS Yusof Ishak Institute. Fravel M, T. (2016). *Maritime Awareness Project Analysis*. USA: Sasakawa USA. Haftendorn, H. (1991). *Boomerang Effect: The*

- Convergence of National and Human Security. *Security Dialogue* , 3- 17.
- Ihsanuddin. (2020). Soal Natuna, Jokowi Tekankan Tidak Ada Kompromi Kedaulatan Teritorial. Jakarta: KOMPASTV.
- Kasanopha, A. N. (2020, Maret 13). <https://www.kompasiana.com>. Retrieved from "Balance of Power", atau-malah-membahayakan-dunia
- Kembaren, L. (2020, Januari 06). <https://www.cnbcindonesia.com>. Retrieved from Seteru Natuna, Berapa Besar Anggaran Militer RI dan China?: [https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104204213-4-127685/natuna memanas-anggaran-militer-ri-sudah siap-tempur](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104204213-4-127685/natuna%20memanas-anggaran-militer-ri-sudah%20siap-tempur)
- Kompas. (2020). Soal Natuna, Jokowi Tekankan Tidak Ada Kompromi Kedaulatan Teritorial. Jakarta: Kompas TV.
- Laksamana Samuel J. Locklear III. (2013). Kami Tak Pernah Meninggalkan Asia-Pasifik. Jakarta:
- Koran Tempo. Likadja, F. E. (1988). Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Maggalatun,
- A. S., & Yunus, N. R. ( 2013). Pokok-pokok Teori Ilmu Negara; Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia. Bandung: Fajar Media